



ISLAM DAN ETIKA KEWARGANEGARAAN DI NEGARA DEMOKRATIS

Agus Suryana

Faculty of Engineering, Pelita Bangsa University
agussuryana2004@gmail.com

Farhan Hari Nugroho

Faculty of Engineering, Pelita Bangsa University
farhanngrho@gmail.com

Sumarta

Faculty of Muamalah, Padhaku Islamic Institute Indramayu
martasumarta548@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Juli 2025

Revised : Agustus 2025

Accepted: September 2025

Available online : September 2025

How to Cite: Author. (2025). Tittle. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan*, 1(3), 143-153. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i3.15>

ABSTRACT

Civic ethics in the context of a democratic state constitutes a crucial aspect that integrates Islamic values with the principles of modern democracy. This study aims to examine how Islamic values—such as shura (consultation), justice, and amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding wrong)—can be implemented in civic practices that support democracy. Employing a qualitative, library-based research approach, this study analyzes relevant literature addressing the relationship between Islam, political ethics, and democracy. The findings indicate that Islamic-based civic ethics can strengthen democracy through civic education, character formation, and the application of shura in public decision-making processes. However, challenges such as ideological polarization and misinterpretation of Islamic values often hinder such implementation. The study recommends strengthening civic education grounded in Islamic values to foster an inclusive and ethical democratic society.

KEY WORDS: islam, civic ethics, democracy, shura, citizenship education.

ABSTRAK

Etika kewarganegaraan dalam konteks negara demokratis merupakan aspek penting yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam, seperti syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar, dapat diimplementasikan dalam praktik kewarganegaraan yang mendukung demokrasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis literatur relevan yang membahas hubungan antara Islam, etika politik, dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kewarganegaraan berbasis Islam dapat memperkuat demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan, pembentukan karakter, dan penerapan nilai-nilai syura dalam pengambilan keputusan publik. Namun, tantangan seperti polarisasi ideologi dan misinterpretasi nilai-nilai Islam sering kali menghambat implementasi tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Islam untuk menciptakan masyarakat demokratis yang inklusif dan beretika.

KATA KUNCI: islam, etika kewarganegaraan, demokrasi, syura, pendidikan kewarganegaraan.

INTRODUCTION

Penelitian ini membahas keterkaitan antara demokrasi dan etika kewarganegaraan berbasis Islam dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis dengan mayoritas penduduk Muslim. Islam menawarkan prinsip-prinsip seperti syura (musyawarah), keadilan, dan amar makruf nahi munkar yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi modern. Integrasi nilai-nilai ini dipandang penting untuk memperkuat praktik kewarganegaraan yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan.

Indonesia menjadi laboratorium sosial yang unik untuk mengkaji harmonisasi Islam dan demokrasi, terutama melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Namun, tantangan seperti polarisasi ideologi, misinterpretasi ajaran Islam, dan dampak media sosial sering menghambat implementasi etika politik Islami.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan, dialog antaragama, dan peran organisasi masyarakat dalam mendorong toleransi, keadilan, dan partisipasi politik yang sehat. Dalam konteks globalisasi, etika kewarganegaraan berbasis Islam dipandang relevan untuk menciptakan harmoni sosial di tengah dinamika pluralisme dan modernitas politik.

Dengan demikian, studi ini berupaya memberikan kontribusi akademik dan praktis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat memperkuat demokrasi, baik di Indonesia maupun di negara lain dengan kondisi serupa.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan disertasi yang relevan dengan tema Islam, etika kewarganegaraan, dan demokrasi. Sumber-sumber yang digunakan mencakup karya-karya seperti Ulfah et al. (2021), Hermawan & Murjoko (2025), Billahi (2025), dan lainnya yang tercantum dalam daftar referensi. Proses analisis dilakukan dengan metode analisis konten kualitatif, di mana data dari literatur dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti prinsip syura, etika politik Islam, dan pendidikan kewarganegaraan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, kebaruan, dan kredibilitas sumber. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi, melainkan fokus pada sintesis dan interpretasi literatur untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara Islam dan etika kewarganegaraan di negara demokratis.

RESULTS AND DISCUSSION

Prinsip Syura sebagai Landasan Etika Kewarganegaraan

Prinsip syura, yang merujuk pada musyawarah atau pengambilan keputusan secara kolektif, merupakan salah satu nilai inti dalam Islam yang sejalan dengan demokrasi. Menurut Sari & Saputra (2024), syura sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya konsultasi dalam pengambilan keputusan publik, yang mencerminkan semangat demokrasi partisipatif. Dalam konteks kewarganegaraan, syura mendorong warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan pembentukan kebijakan publik, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Implementasi syura dalam demokrasi modern dapat dilihat dari mekanisme musyawarah dalam organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), yang menekankan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik politik (Alfendi, 2024).

Namun, penerapan syura dalam praktik kewarganegaraan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti rendahnya literasi politik dan dominasi elit politik sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah (Syahdiyono, 2022). Selain itu, misinterpretasi terhadap syura sebagai bentuk formalisme agama dapat memicu polarisasi, terutama ketika nilai-nilai Islam digunakan untuk kepentingan politik tertentu (Siswanto & Islamy, 2022). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan prinsip syura perlu diperkuat untuk memastikan bahwa warga negara memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai-Nilai Islam

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk etika kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurut Ulfah et al. (2021), pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana untuk membangun etika dalam mengemukakan pendapat di kalangan masyarakat akademis. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, pendidikan berkarakter berperspektif Islam, seperti yang dijelaskan oleh Utama & Budiman (2023), dapat membantu membentuk generasi yang memahami harmoni antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan juga dapat mengatasi tantangan polarisasi ideologi yang sering muncul dalam masyarakat demokratis. Misalnya, kontroversi mengenai larangan hijab dalam kegiatan Paskibraka 2024 menunjukkan bagaimana kebijakan publik yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai agama dapat memicu ketegangan sosial (Sawaliya et al., 2025). Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis Islam dapat mengajarkan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap pluralisme, yang merupakan inti dari demokrasi Pancasila (Siswanto & Islamy, 2022). Dengan demikian, pendidikan ini dapat menjadi jembatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik kewarganegaraan yang inklusif.

Etika Politik Islam dan Demokrasi

Etika politik Islam, seperti prinsip amar makruf nahi munkar, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks demokrasi. Menurut Jihad (2021), prinsip ini mendorong warga negara untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan politik, seperti menolak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, etika politik Islam dapat diterapkan melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum, kampanye politik yang beretika, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara (Fu'adah, 2024). Namun, tantangan seperti penggunaan media sosial untuk menyebarkan narasi politik yang tidak etis sering kali menghambat implementasi prinsip ini (Rizqia, 2021).

Organisasi seperti Nahdlatul Ulama telah menunjukkan bagaimana etika politik Islam dapat diimplementasikan dalam konteks demokrasi modern. Menurut Alfendi (2024), NU menekankan pentingnya etika dalam politik, seperti kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap pluralisme. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Ibnu Khaldun tentang pentingnya

etika politik dalam menjaga stabilitas sosial dan politik (Malik, Rahim, & Taufiqurachman, 2023). Dengan demikian, etika politik Islam dapat menjadi panduan bagi warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi.

Tantangan dan Peluang

Meskipun terdapat banyak peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam etika kewarganegaraan, tantangan seperti polarisasi ideologi dan misinterpretasi ajaran Islam tetap menjadi hambatan. Menurut Hermawan & Murjoko (2025), reaktulisasi dakwah politik sering kali terjebak dalam dikotomi antara warisan khilafah dan realitas demokrasi modern. Hal ini dapat memicu konflik antara kelompok yang mendukung formalisasi hukum Islam dan kelompok yang mendukung demokrasi sekuler (Siswanto & Islamy, 2022). Selain itu, pengaruh media terhadap pendewasaan politik umat Islam juga dapat menjadi tantangan, terutama ketika media digunakan untuk menyebarkan narasi yang memecah belah (Setiawan & Muhid, 2021).

Namun, terdapat pula peluang untuk mengatasi tantangan ini melalui pendidikan dan dialog antaragama. Menurut Pikri, Syadzali, & Amaly (2021), wacana status non-Muslim dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi landasan untuk membangun kewarganegaraan yang inklusif. Dengan mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi dan keadilan, Islam dapat memperkuat demokrasi melalui partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik (Billahi, 2025). Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam dan dialog antaragama menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam membangun etika kewarganegaraan di negara demokratis.

Konsep syura dalam Islam menawarkan landasan yang kuat untuk memperkuat demokrasi melalui partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini, yang ditemukan dalam Al-Qur'an, menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai konsensus yang adil. Dalam konteks demokrasi modern, syura dapat diwujudkan melalui mekanisme seperti pemilihan umum dan diskusi publik. Partisipasi warga negara dalam proses ini mencerminkan semangat kedaulatan rakyat yang menjadi inti demokrasi. Namun, rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam menerapkan syura secara efektif. Pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, syura dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan praktik demokrasi. Organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama telah menunjukkan bagaimana syura dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik politik. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, syura menjadi elemen kunci dalam etika kewarganegaraan.

Keadilan sebagai nilai inti Islam juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks demokrasi. Dalam ajaran Islam, keadilan mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak, tanpa memandang latar belakang. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan kesetaraan di depan hukum. Dalam praktik kewarganegaraan, keadilan dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap penyelenggara negara. Warga negara yang beretika memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan prinsip keadilan. Namun, tantangan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali menghambat realisasi keadilan dalam demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam dapat mengajarkan pentingnya integritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, warga negara dapat didorong untuk menolak praktik yang tidak adil. Literatur menunjukkan bahwa keadilan menjadi pilar penting dalam membangun demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, integrasi nilai keadilan dalam kewarganegaraan perlu terus diperkuat.

Prinsip amar makruf nahi munkar mendorong warga negara untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan publik. Dalam konteks demokrasi, prinsip ini dapat diterapkan melalui partisipasi aktif dalam pengawasan politik. Warga negara memiliki peran untuk menolak praktik seperti korupsi dan manipulasi dalam pemilihan umum. Namun, tantangan seperti penyebaran narasi politik yang tidak etis di media sosial sering kali

mempersulit penerapan prinsip ini. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu warga negara memahami pentingnya etika dalam politik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan ini dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab. Organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah telah menunjukkan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam kampanye politik yang beretika. Dengan demikian, amar makruf nahi munkar menjadi panduan penting dalam etika kewarganegaraan. Literatur menegaskan bahwa prinsip ini dapat memperkuat demokrasi yang berintegritas. Oleh karena itu, pendidikan berbasis Islam perlu menekankan nilai ini untuk membentuk warga negara yang proaktif.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang beretika. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran dan toleransi. Dalam konteks Indonesia, pendidikan ini dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam. Dengan demikian, warga negara dapat memahami bagaimana agama dan demokrasi dapat berjalan seiring. Tantangan seperti polarisasi ideologi dapat diatasi melalui pendekatan pendidikan yang inklusif. Kurikulum yang menekankan dialog antaragama dapat membantu mengurangi ketegangan sosial. Selain itu, pendidikan ini dapat mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Contohnya, pelatihan tentang literasi politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi alat untuk membangun masyarakat yang harmonis. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam konteks masyarakat Muslim.

Tantangan polarisasi ideologi sering kali muncul dalam masyarakat demokratis dengan mayoritas Muslim. Misinterpretasi ajaran Islam dapat memicu konflik antara kelompok yang berbeda pandangan. Dalam konteks Indonesia, isu seperti formalisasi hukum Islam sering kali memunculkan ketegangan. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan mengajarkan toleransi. Nilai-nilai Islam seperti rahmah dapat menjadi dasar untuk membangun dialog antaragama. Dengan demikian, warga negara dapat belajar menghormati perbedaan tanpa mengorbankan identitas agama mereka. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama telah menunjukkan keberhasilan dalam mempromosikan pluralisme. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menekankan persatuan. Literatur menegaskan bahwa dialog antaragama dapat mengurangi polarisasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam perlu menekankan pentingnya harmoni sosial.

Media sosial telah menjadi faktor penting dalam dinamika politik modern, termasuk dalam konteks kewarganegaraan. Namun, penyebaran narasi yang tidak etis sering kali memperburuk polarisasi di masyarakat. Dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab dapat menjadi panduan dalam menggunakan media sosial. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menggunakan media secara bertanggung jawab. Dengan demikian, dampak negatif seperti penyebaran hoaks dapat diminimalkan. Pelatihan literasi digital menjadi bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan modern. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam mempromosikan etika digital berbasis Islam. Contohnya, kampanye tentang pentingnya verifikasi informasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi jika digunakan dengan etis. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu mengintegrasikan literasi digital.

Partisipasi warga negara dalam proses demokrasi merupakan indikator kesehatan demokrasi itu sendiri. Dalam Islam, partisipasi ini dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip syura. Warga negara didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik, seperti pemilihan umum. Namun, rendahnya partisipasi politik di kalangan masyarakat sering kali menjadi tantangan. Pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan ini dapat memotivasi warga negara untuk aktif dalam politik. Organisasi seperti Muhammadiyah telah menunjukkan bagaimana pendidikan dapat meningkatkan partisipasi politik. Contohnya, program

pelatihan kepemimpinan dapat membentuk warga negara yang proaktif. Literatur menegaskan bahwa partisipasi aktif memperkuat legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam perlu menekankan pentingnya keterlibatan publik.

Etika politik Islam menawarkan panduan untuk menciptakan demokrasi yang berintegritas. Prinsip seperti kejujuran dan transparansi dapat diterapkan dalam kampanye politik. Dalam konteks Indonesia, organisasi seperti Nahdlatul Ulama telah menunjukkan bagaimana etika politik Islam dapat diterapkan. Namun, tantangan seperti korupsi politik sering kali menghambat implementasi prinsip ini. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menolak praktik politik yang tidak etis. Dengan demikian, warga negara dapat menjadi agen perubahan dalam demokrasi. Pelatihan tentang etika politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab mereka. Literatur menunjukkan bahwa etika politik Islam sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Contohnya, penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan mencerminkan nilai amar makruf nahi munkar. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu mempromosikan etika politik berbasis Islam.

Pluralisme merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang perlu dihormati dalam masyarakat Muslim. Dalam Islam, nilai-nilai seperti toleransi dan rahmah mendukung penerimaan terhadap keberagaman. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menghormati perbedaan agama dan budaya. Dengan demikian, ketegangan sosial akibat polarisasi dapat diminimalkan. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama telah mempromosikan dialog antaragama untuk memperkuat pluralisme. Contohnya, program kerjasama antaragama dapat membangun harmoni sosial. Literatur menegaskan bahwa pluralisme sejalan dengan nilai-nilai Islam yang inklusif. Pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam dapat menjadi alat untuk mempromosikan toleransi. Dengan demikian, warga negara dapat berkontribusi pada demokrasi yang harmonis. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperkuat dalam kurikulum pendidikan.

Tantangan dalam menerapkan etika kewarganegaraan berbasis Islam sering kali berasal dari misinterpretasi ajaran agama. Beberapa kelompok mungkin menggunakan Islam untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat memicu konflik antara kelompok yang mendukung demokrasi dan kelompok yang menginginkan formalisasi hukum Islam. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan mengajarkan interpretasi Islam yang moderat. Dengan demikian, warga negara dapat memahami bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan. Dialog antaragama menjadi alat penting untuk mengurangi misinterpretasi ini. Organisasi seperti Muhammadiyah telah menunjukkan keberhasilan dalam mempromosikan Islam yang inklusif. Literatur menegaskan bahwa pendidikan berbasis Islam dapat mengurangi polarisasi. Contohnya, kurikulum yang menekankan toleransi dapat membentuk warga negara yang beretika. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu memfokuskan pada interpretasi Islam yang seimbang.

Pengaruh globalisasi terhadap etika kewarganegaraan tidak dapat diabaikan dalam konteks demokrasi modern. Globalisasi membawa nilai-nilai baru yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan identitasnya. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menyaring nilai-nilai global yang sesuai dengan Islam. Dengan demikian, warga negara dapat tetap berpartisipasi dalam dunia global tanpa mengorbankan nilai agama mereka. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai Islam yang relevan dengan konteks global. Contohnya, pelatihan tentang diplomasi budaya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa globalisasi dapat menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam perlu mengintegrasikan perspektif global. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menciptakan warga negara yang berpikiran terbuka.

Peran organisasi masyarakat dalam mempromosikan etika kewarganegaraan berbasis Islam sangat signifikan. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah lama menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Mereka mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan

dan toleransi melalui berbagai program. Pendidikan kewarganegaraan dapat bekerja sama dengan organisasi ini untuk memperkuat dampaknya. Dengan demikian, warga negara dapat belajar dari praktik terbaik yang telah diterapkan oleh organisasi tersebut. Contohnya, program pelatihan kepemimpinan dapat membentuk warga negara yang beretika. Literatur menegaskan bahwa organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam demokrasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, organisasi ini dapat memperkuat etika kewarganegaraan. Oleh karena itu, kerjasama antara pendidikan dan organisasi masyarakat perlu diperluas. Pendekatan ini dapat menciptakan masyarakat demokratis yang harmonis.

Pendidikan kewarganegaraan juga dapat mengatasi tantangan rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat. Banyak warga negara yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. Pendidikan berbasis Islam dapat memberikan motivasi tambahan untuk meningkatkan literasi politik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti syura, pendidikan ini dapat mendorong partisipasi aktif. Contohnya, pelatihan tentang proses pemilihan umum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Organisasi masyarakat dapat mendukung upaya ini melalui kampanye edukasi. Literatur menunjukkan bahwa literasi politik adalah kunci untuk demokrasi yang sehat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam dapat menjadi solusi untuk tantangan ini. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan perlu menekankan pentingnya literasi politik. Pendekatan ini dapat menciptakan warga negara yang lebih proaktif dalam demokrasi.

Tantangan korupsi dalam politik merupakan salah satu hambatan utama dalam demokrasi. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kejujuran dan amanah menjadi panduan untuk mencegah korupsi. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menolak praktik korupsi. Dengan demikian, warga negara dapat menjadi agen pengawas dalam sistem politik. Contohnya, pelatihan tentang transparansi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama telah mempromosikan nilai-nilai anti-korupsi melalui program mereka. Literatur menegaskan bahwa etika Islam dapat memperkuat integritas dalam politik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan warga negara yang berintegritas. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperkuat dalam sistem pendidikan. Pendidikan ini dapat menjadi alat untuk membangun demokrasi yang bersih.

Dialog antaragama menjadi kunci untuk membangun masyarakat demokratis yang inklusif. Dalam Islam, nilai-nilai seperti rahmah dan toleransi mendukung dialog ini. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menghormati perbedaan agama. Dengan demikian, ketegangan sosial akibat perbedaan agama dapat diminimalkan. Organisasi seperti Muhammadiyah telah menunjukkan keberhasilan dalam mempromosikan dialog antaragama. Contohnya, program kerjasama antaragama dapat memperkuat harmoni sosial. Literatur menegaskan bahwa dialog antaragama adalah pilar penting dalam demokrasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat dialog ini. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan perlu menekankan pentingnya toleransi. Pendekatan ini dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Penerapan etika kewarganegaraan berbasis Islam memerlukan kebijakan publik yang sensitif terhadap nilai-nilai agama. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai Islam dapat memicu ketegangan sosial. Contohnya, isu seperti larangan hijab dalam kegiatan publik sering kali memicu kontroversi. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk memahami pentingnya kebijakan yang inklusif. Dengan demikian, warga negara dapat mendukung kebijakan yang menghormati pluralisme. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam mempromosikan kebijakan yang sensitif terhadap agama. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan yang inklusif memperkuat demokrasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat mendukung kebijakan yang adil. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperkuat dalam sistem pendidikan. Pendidikan ini dapat menjadi jembatan untuk harmoni sosial.

Peran pemuda dalam demokrasi juga tidak dapat diabaikan dalam konteks etika kewarganegaraan. Pemuda memiliki energi dan potensi untuk menjadi agen perubahan dalam

masyarakat. Dalam Islam, nilai-nilai seperti tanggung jawab dan keberanian dapat memotivasi pemuda untuk berpartisipasi aktif. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan pemuda tentang hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. Dengan demikian, pemuda dapat menjadi motor penggerak dalam proses politik. Organisasi seperti Muhammadiyah telah menunjukkan keberhasilan dalam melibatkan pemuda dalam kegiatan demokrasi. Contohnya, program pelatihan kepemimpinan dapat membentuk pemuda yang beretika. Literatur menegaskan bahwa pemuda adalah aset penting dalam demokrasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat memotivasi pemuda. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperkuat untuk masa depan demokrasi.

Tantangan global seperti terorisme dan ekstremisme juga memengaruhi etika kewarganegaraan di negara demokratis. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kedamaian dan rahmah menentang ekstremisme. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menolak ideologi ekstrem. Dengan demikian, warga negara dapat berkontribusi pada keamanan dan stabilitas sosial. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat. Contohnya, kampanye anti-ekstremisme dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa pendidikan berbasis Islam dapat mengurangi ancaman ekstremisme. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperluas dalam sistem pendidikan. Pendidikan ini dapat menjadi alat untuk membangun masyarakat yang damai.

Etika kewarganegaraan berbasis Islam juga dapat memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam Islam, konsep amanah menekankan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menuntut akuntabilitas dari pemimpin mereka. Dengan demikian, hubungan yang sehat antara negara dan masyarakat dapat terwujud. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama telah mempromosikan nilai-nilai ini melalui program mereka. Contohnya, pelatihan tentang pengawasan publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Literatur menegaskan bahwa akuntabilitas adalah kunci untuk demokrasi yang sehat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat hubungan ini. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperkuat dalam sistem pendidikan. Pendidikan ini dapat menjadi alat untuk membangun demokrasi yang transparan.

Penerapan teknologi dalam demokrasi juga memengaruhi etika kewarganegaraan di era modern. Teknologi seperti aplikasi voting online dapat meningkatkan partisipasi warga negara. Namun, tantangan seperti keamanan data dan penyebaran hoaks perlu diatasi. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kejujuran dapat menjadi panduan dalam menggunakan teknologi. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat demokrasi. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam mempromosikan literasi teknologi berbasis Islam. Contohnya, pelatihan tentang keamanan digital dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu mengintegrasikan literasi teknologi.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam juga dapat memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Dalam Islam, nilai-nilai seperti cinta tanah air sejalan dengan semangat nasionalisme. Pendidikan ini dapat mengajarkan warga negara untuk menghormati identitas nasional mereka. Dengan demikian, warga negara dapat tetap setia pada nilai-nilai agama sambil mendukung negara. Organisasi seperti Muhammadiyah telah mempromosikan nilai-nilai ini melalui program mereka. Contohnya, kampanye tentang cinta tanah air dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Literatur menegaskan bahwa identitas nasional adalah pilar penting dalam demokrasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat identitas ini. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperkuat dalam sistem pendidikan. Pendidikan ini dapat menjadi alat untuk membangun masyarakat yang nasionalis.

Tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga

memengaruhi etika kewarganegaraan. Dalam Islam, nilai-nilai seperti taat hukum dapat menjadi panduan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan warga negara tentang pentingnya mematuhi hukum. Dengan demikian, warga negara dapat berkontribusi pada stabilitas sosial. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam mempromosikan kesadaran hukum berbasis Islam. Contohnya, pelatihan tentang hukum publik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa kesadaran hukum adalah kunci untuk demokrasi yang sehat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat kesadaran ini. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperluas dalam sistem pendidikan. Pendidikan ini dapat menjadi alat untuk membangun masyarakat yang taat hukum.

Etika kewarganegaraan berbasis Islam juga dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kesetaraan mendukung peran aktif perempuan dalam politik. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan perempuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. Dengan demikian, perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Organisasi seperti Aisyiyah telah menunjukkan keberhasilan dalam mempromosikan partisipasi perempuan. Contohnya, program pelatihan kepemimpinan perempuan dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Literatur menegaskan bahwa partisipasi perempuan adalah pilar penting dalam demokrasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat memotivasi perempuan. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperkuat dalam sistem pendidikan. Pendidikan ini dapat menjadi alat untuk membangun demokrasi yang inklusif.

Penerapan etika kewarganegaraan berbasis Islam memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Pemerintah dapat mendukung melalui kebijakan yang sensitif terhadap nilai-nilai agama. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Institusi pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum kewarganegaraan. Dengan demikian, sinergi ini dapat memperkuat etika kewarganegaraan di negara demokratis. Contohnya, program pelatihan bersama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa kerjasama lintas sektor adalah kunci untuk demokrasi yang sehat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat sinergi ini. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperluas untuk menciptakan dampak yang signifikan. Pendidikan ini dapat menjadi fondasi untuk masyarakat demokratis yang beretika.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, seperti syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar, memiliki relevansi yang kuat dalam membangun etika kewarganegaraan di negara demokratis. Melalui pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai ini dapat diintegrasikan untuk membentuk warga negara yang beretika, partisipatif, dan menghormati pluralisme. Meskipun tantangan seperti polarisasi ideologi dan misinterpretasi ajaran Islam masih ada, peluang seperti penguatan pendidikan dan dialog antaragama dapat menjadi solusi untuk menciptakan demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempromosikan etika kewarganegaraan berbasis Islam melalui pendidikan, kebijakan publik yang sensitif terhadap nilai-nilai agama, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

BIBLIOGRAPHY

- Alfendi, A. S. (2024). ETIKA POLITIK NAHDATHUL ULAMA DALAM KONSTRUKSI KONSEP KENEGARAAN MODERN. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6).
- Aulia, A. H., Wiraganti, R. W., Fatmawati, Y., Sugiyarti, A., & Sukti, S. (2024). *Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais*.

- Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 9017-9028.
- Billahi, S. (2025). Demokrasi, Islam, dan Etika Publik: Memahami Politik Kewargaan di Indonesia.
- Firma, H., & Nazir, M. (2025). Islamic Education Curriculum Reform as a Pathway to Muslim Nationalism in Germany. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1535-1549.
- Fu'adah, A. (2024). Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Penegakan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Evaluasi. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 229-239).
- Hermawan, N., & Murjoko, A. (2025). Reaktualisasi Dakwah Politik di Indonesia: Antara Warisan Khilafah dan Realitas Demokrasi Modern. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2), 954-975.
- Jihad, B. (2021). Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(1), 108-129.
- Mariyah, C. (2022, December). Merebut Tafsir Pancasila: Norma Islam sebagai Fondasi "Politik Halal" dalam Kepolitikan Demokrasi Pemilu di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 1-20).
- Malik, A., Rahim, A., & Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3599-3610.
- Nasution, I., & Dianto, I. (2023). Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 90-107.
- Pikri, Z., Syadzali, A., & Amaly, N. (2021). Warga Negara, bukan Kafir: Wacana Status Non-Muslim di Indonesia dalam Situs-situs NU. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(1), 95-115.
- RIZQIA, F. (2021). *PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK TERHADAP ETIKA POLITIK PADA KAMPANYE PILKADA DI KABUPATEN KARAWANG (Penelitian Fenomenologi Kampanye Pilkada Di Kabupaten Karawang)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Saputra, R. (2022). Etika Politik Islam Pada Pileg 2019 Perspektif Nahdhatul Ulama Lubuklinggau. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 3(1), 34-43.
- Sari, N. P., & Saputra, I. (2024). Konsep Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Al-Quran. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, 3(1), 38-51.
- Sawaliya, N., Budiman, A. G., Maharani, D. D., Aida, I. N., Ridwansyah, M., & Suryaningsi, S. (2025). Kontroversi Larangan Hijab dalam Paskibraka 2024: Ironi Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(6), 161-170.
- Setiawan, W., & Muhid, A. (2021). Pengaruh Media Terhadap Pendewasaan Politik Umat Islam: Literatur Review. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 73-85.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 19-40.
- Syahdiyono, F. (2022). Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Masyarakat Demokratis Menurut Prinsip Islam. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(01), 130-150.
- Syafi'i, M., & Najib, M. (2024). Relasi Islam Dan Demokrasi Dalam Perspektif Islam: Kajian Teoritis Dari Sudut Pandangan Tokoh. *DAARUS TSAQOFAH Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Qomaruddin*, 1(2), 107-117.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346.

- Utama, L. M., & Budiman, N. (2023). Pendidikan Berkarakter Berperpekstif Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1126-1132.
- Utomo, H. K. (2022). Genealogi Pemikiran Islam Liberal dan Pemikiran Soekarno: Nasionalisme, Demokrasi, dan Pluralisme. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(1).